

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam rangka meningkatkan pelayanan, kenyamanan, kebersihan serta keindahan di wilayah Kabupaten Bandung adalah tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan Kabupaten Bandung yang dipimpin oleh seorang Bupati. Hal tersebut selaras dengan fungsi dari pemerintahan daerah sebagai perantara pemerintah pusat ataupun provinsi untuk melaksanakan segala urusan terkait wilayah yang dipimpinnya.

Menurut dokumen yang berjudul Himpunan Peraturan Perundangan Tentang Pengolahan Sampah di Kabupaten Bandung pemerintahan daerah bertugas dalam manajemen penanganan sampah sehingga dapat mencapai arah dan tujuan yang telah disepakati bersama

Pemerintah daerah dan pemerintah dari pusat mempunyai tugas yang harus dilaksanakan seperti yang telah di maksudkan dalam pasal 5 yang terkumpul dalam Himpunan Peraturan Perundangan Tentang Pengolahan Sampah di Kabupaten Bandung Tahun 2018 pada Bab III tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah:

- a. Mengembangkan penumbuhan dan peningkatan kesadaran masyarakat didalam penanganan sampah
- b. Melaksanakan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan sampah serta penanganannya
- c. Memberikan fasilitas, pengembangan serta pelaksanaan dalam upaya penanganan serta pemanfaatan sampah
- d. Memfasilitasi sarana dan prasana untuk penanganan sampah
- e. Memberikan dorongan dan memberikan fasilitas serta manfaat dalam penanganan sampah
- f. Salah satu inovasi dalam menangani permasalahan sampah yang ada dimasyarakat yaitu dengan menggunakan teknologi lokal

- g. Melaksanakan hubungan baik sesama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk tercapainya tujuan dalam penanganan sampah yang baik

(Himpunan Peraturan Perundangan Tentang Pengolahan Sampah di Kabupaten Bandung Tahun 2018)

Gambar 1.1

Keadaan Sampah di Kabupaten Bandung Tahun 2019



Sumber : Pikiran Rakyat (2019)

Gambar 1.2

Kondisi Sampah di Sungai Citarum



Sumber : DetikNews 2017

Volume sampah di Kabupaten Bandung semakin hari semakin meningkat. Semakin tingginya angka pertumbuhan penduduk, tingkat produksi sampah dari masing-masing individu semakin banyak. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Data jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kecamatan tahun 2017-2019 adalah sebanyak 3.775.279 jiwa. Dari data jiwa penduduk tersebut, tak heran jika Kabupaten Bandung memiliki volume sampah yang sangat tinggi. Hal ini menjadi sebab terjadinya banjir di beberapa daerah Kabupaten Bandung. Peran pemerintah Kabupaten Bandung sangat diperlukan dalam penanganan sampah di lingkungan.

Melihat keadaan sampah domestik yang sangat besar di Kabupaten Bandung. Penulis melihat di Kabupaten Bandung tersebut intensitas bencana alam berupa banjir pasti akan semakin meningkat. Merujuk kepada himpunan peraturan perundangan tentang pengolahan sampah mengenai tugas dan wewenang pemerintah diatas, pergerakan pemerintahan tentang penanganan sampah di Kabupaten Bandung sangat dinantikan oleh masyarakat di Kabupaten Bandung

1.2 Latar Belakang

Sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia membuat banyak wisatawan non domestik untuk sengaja berkunjung ke Indonesia dalam rangka berlibur menikmati keindahan alamnya. Di samping kekayaan alam yang berlimpah Indonesia pun mempunyai satu permasalahan yang sampai saat ini harus diselesaikan dan menjadi tanggung jawab bersama. Volume sampah yang terus meningkat dan bahkan permasalahan sampah pun sampa terseret dan mencemari lingkungan

Indonesia telah masuk ke dalam deretan kedua setelah Tiongkok sebagai negara dengan pencemaran laut di dunia. Tidak sedikit sampah plastik yang berasal dari daratan dan terbawa hingga ke laut sehingga mengotori laut di Indonesia. Berbicara mengenai permasalahan sampah, sebagian masyarakat pasti bertanya-tanya tentang dimanakah akhir perjalanan sampah kita. Seperti yang kita tahu di setiap daerah permasalahan sampah adalah permasalahan yang darurat yang harus kita hadapi bersama. Peran pemerintah sangatlah penting dalam hal ini, peran pemerintah tidak akan berjalan jika masyarakat tidak mau *aware* terhadap penanganan sampah darurat di Indonesia.

Tidak sedikit negara berkembang mengalami permasalahan mengenai sampah. Adanya volume sampah yang tinggi dan tidak seimbang dengan penanganan limbah yang ramah lingkungan, tidak memungkinkan untuk menjadi peluang terjadinya bencana banjir dan kerusakan lingkungan. TPA yang ada di seluruh daerah sampai detik ini menjadi solusi akhir penanganan sampah dengan metode konvensional yaitu dengan metode kumpul angkut buang. Tanpa kita sadari dengan adanya TPA ini yang semakin tahun banyaknya sampah yang tertimbun akan merusak kekayaan alam kita sedikit demi sedikit. Dengan adanya TPA maka akan adanya dampak negative bagi lingkungan diantaranya akan timbul gas dan lindi yang sangat berpotensi untuk merusak lingkungan. (Ir Kasam)

Gambar 1.3

Keadaan sampah di salah satu laut Indonesia



Menurut sebuah studi (Jenna Jambeck, seorang professor teknik lingkungan dari University of Georgia ,A, 2015) yang hasil risetnya menunjukkan kepada kita semua tentang Indonesia sebagai negara dengan penyumbang sampah plastik ke lautan dan tengah memasuki deretan kedua. Dan Jambeck memperkirakan setiap tahun ada 4,8 hingga 12,7 juta metric ton plastik yang sampai masuk ke lautan

Dengan adanya fakta tersebut, Indonesia tidak bisa mengulur waktu lagi untuk memikirkan penanganan sampah yang semakin hari semakin meningkat. Ditambah dengan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang setiap harinya semakin tinggi maka produksi sampah yang dihasilkan setiap orang meningkat.

Gambar 1.4

Sosialisasi KangPisman oleh DLH Kota Bandung



Sumber : Majalahsora.com

Kondisi penyelenggaraan pemerintahan, mengisyaratkan empat variabel yang harus dijalankan, yaitu demokratisasi, pelayanan, pemberdayaan dan transparansi. Salah satu solusi dalam penanganan sampah adalah adanya peran dan tanggung jawab dari pemerintah. Seperti gambar diatas yang diambil dari artikel majalahsora.com terlihat adanya gerakan pemerintah Kota Bandung melakukan sosialisasi dan pelatihan Kang Pisman oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Turangga dan DLHK Kota Bandung. (Majalahsora.com)

KangPisman ini merupakan program Wali Kota Bandung dalam caranya untuk penanganan sampah yang semakin meningkat. Program ini adalah program yang diselenggarakannya untuk mengurangi dan memanfaatkan sampah menjadi sampah ekonomis. Program KangPisman harus diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat di Kota

Bandung. Melihat dari salah satu gerakan pemerintah Kota Bandung dengan adanya program KangPisman ini menunjukkan ternyata peran pemerintah memang sangat utama dalam menangani suatu permasalahan.

Kegiatan sosialisasi ini adalah salah satu bentuk komunikasi pemerintah yang efektif dan sangat bermanfaat bagi pengetahuan masyarakat dan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat pentingnya menjaga lingkungan. Proses komunikasi yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah komunikasi yang terjalin dalam komunikasi antar manusia atau yang biasa kita sebut dengan *human communication*. Tujuan utama dari pada komunikasi adalah sebagai penemuan diri sendiri (*personal discovery*). Komunikasi antar manusia memberikan peran kepada manusia dalam pembentukan persepsi.

Komunikasi pemerintah menurut Erliana Hasan Komunikasi pemerintah merupakan “Penyampaian ide, program dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Pemerintah dapat diasumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan, namun dalam suasana tertentu bisa sebaliknya masyarakat berada pada posisi sebagai penyampai ide dan pemerintah berada pada posisi mencermati apa yang diinginkan masyarakat” (Erliana Hasan, 2005:95)

Dari penjelasan satu teori diatas, terkadang kita memiliki kemampuan yang terbatas dalam mendengar, menerima dan mencerna segala pesan yang kita dapatkan. Banyak kesulitan dalam berkomunikasi yang berakar pada kesalahpahaman seperti ini. Penilaian yang dikeluarkan masyarakat beraneka ragam. Masyarakat memiliki penilaian yang berbeda-beda terhadap apa yang di alaminya sesuai dengan pengalaman yang mereka dapat. Membahas persoalan mengenai penanganan sampah di lingkungan, persepsi masyarakat mengenai lingkungan sangatlah penting untuk diteliti dan dibahas.

Persepsi merupakan sebuah gambaran yang tampak pada diri kita sendiri ketika dihadapkan dengan suatu hal yang menjadi pusat perhatian kita. Dan pada kenyataannya persepsi merupakan sikap dalam diri kita untuk menilai terhadap sesuatu objek yang menjadi perhatian kita. Adapun kaitannya pengertian persepsi dengan lingkungan adalah suatu proses seseorang dapat memfilter dan mengartikan makna indera yang didapat

agar memberikan arti, sikap atau pandangannya kepada lingkungannya (Robbins 2003). Se jauh ini berbicara mengenai pengelolaan sampah, masyarakat harus teredukasi dengan segala bentuk komunikasi pemerintah mengenai penanganan sampah.

Melalui penelitian ini, penulis mrelihat pada penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai pengaruh komunikasi pemerintah terhadap partisipasi masyarakat yaitu pada penelitian Deni Rahmat Hidayat (2016) yang meneliti besarnya pengaruh komunikasi pemerintah terhadap partsipasi masyarakat di Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung dengan studi kasus tentang BKBKEMAS yaitu suatu program bina keluarga balita kesiapan masuk sekolah. Melalui penelitian ini, penulis dapat melihat perpaduan antara komunikasi pemerintah dengan partisipasi masyarakat menjadi suatu hal yang harus diperhatikan oleh jajaran pemerintah untuk dapat berkomunikasi dengan efektif dan memberikan pemahaman serta informasi yang jelas kepada masyarakat.

Selain penelitian Deni Rahmat Hidayat (2016) disini penulis melihat pada penelitian Akhirul Aminulloh dan Dody Setyawan (2013) yang meneliti tentang pengaruh komunikasi politik aparatur pemerintah terhadap pelayanan publik. Pada penelitian ini penulis juga melihat bahwa konteks komunikasi komunikasi sangatlah luas khususnya pemerintahan yang berjalan bersamaan dengan politik. Komunikasi politik berperan penting terhadap persepsi masyarakat dan pelayanan publik.

Penulis ingin mengetahui seberapa besar pengaruh komunikasi pemerintah terhadap persepsi masyarakat mengenai penanganan sampah di Kabupaten Bandung. Penelitian ini akan mengacu pada pada dua konsep khusus yakni komunikasi dan persepsi, dimana kedua konsep tersebut akan menjadi acuan utama penulis untuk menganalisis fenomena yang ada.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini berkontribusi pada bidang ilmu komunikasi khususnya tentang ilmu komunikasi pemerintah. Selain pada bidang ilmu komunikasi, penelitian ini berkontribusi juga pada bidang ilmu *public realtions*. Penelitian ini berkontribusi di bidang humas pemerintah yang dimana dengan adanya penelitian ini dapat memberikan rekomendasi terkait pentingnya peran humas dalam berkomunikasi kepada masyarakat tentang pentingnya penanganan sampah dari masing-

masing rumah tangga. Dengan adanya sikap persuasif dari jajaran pemerintahan Kabupaten Bandung, penulis yakin masyarakat Kabupaten Bandung akan sadar betapa pentingnya penanganan sampah di Kabupaten Bandung

Berdasarkan hal ini, adanya ketertarikan dari penulis untuk melakukan penelitian kepada masyarakat Kabupaten Bandung tentang **MASYARAKAT “PENGARUH KOMUNIKASI PEMERINTAH TERHADAP PERSEPSI MENGENAI PENANGANAN SAMPAH DI KABUPATEN BANDUNG”**.

1.3 Fokus Penelitian

Dalam fokus penelitian, penulis melakukan fokus penelitian kepada masyarakat tentang pengaruh komunikasi pemerintah terhadap persepsi masyarakat mengenai penanganan sampah di Kabupaten Bandung.

1.4 Rumusan Penelitian

Dengan hal ini penulis menetapkan rumusan masalah. Dalam rumusan masalah penulis menyajikan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Rumusan dalam masalah ini adalah:

- a. Adakah pengaruh komunikasi pemerintah terhadap persepsi masyarakat ?
- b. Seberapa besar pengaruh komunikasi pemerintah terhadap persepsi masyarakat mengenai penanganan sampah di Kabupaten Bandung?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui adakah pengaruh komunikasi pemerintah terhadap persepsi masyarakat
- b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh komunikasi pemerintah terhadap persepsi masyarakat mengenai penanganan sampah di Kabupaten Bandung

1.6 Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini untuk memperkaya dan mengembangkan kajian Ilmu Komunikasi secara umum, terutama komunikasi pemerintah dan persepsi masyarakat. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ini semoga berguna bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Telkom secara umum sebagai literature dan memperluas pengembangan kajian informasi tentang pengaruh komunikasi pemerintah terhadap persepsi masyarakat khususnya mengenai penanganan sampah

b. Manfaat praktis

Manfaat bagi pembaca dapat mengetahui bagaimana pengaruh komunikasi pemerintah terhadap persepsi masyarakat mengenai penanganan sampah di lingkungan. Dan juga dapat mengetahui adanya pengaruh komunikasi pemerintah yang dapat membentuk persepsi masyarakat.

1.7 Waktu dan Periode Penelitian

TABEL 1.1

Kegiatan	Des 2021	Jan 2021	Feb 2021	Mar 2021	Apr 2021	Mei 2021	Juni 2021	Juli 2021	Agt 2021
Menentukan topik dan objek penelitian									
Melakukan pra penelitian									
Menyusun proposal									
Mendaftar DE									
Melaksanakan									

revisi DE									
Melaksanakan penelitian dan pengumpulan data									
Analisis data									
Membuat laporan penelitian									
Pelaksanaan sidang skripsi									